

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hakekat dari otonomi daerah adalah pemberian mandat sepenuhnya kepada masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Sementara itu dilihat dari potensi dan peluang sekolah seperti disebutkan di atas, dimana sekolah sudah menjadi milik, dari, oleh dan untuk masyarakat, maka sekolah lebih memiliki kesiapan dibanding lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian jika sekolah mampu membaca potensi dan peluang tersebut maka akan lebih dapat dinamis atau paling tidak akan eksis walaupun keberadaannya berada pada daerah kategori miskin.

Banyak indikator yang dapat dijadikan tolak ukur bagi keunggulan dan mutu suatu sekolah. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik dengan materi dan sistem tata kelola yang baik dan disampaikan oleh guru yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya guru (Mulyasana, 2011: 120). Pengelolaan pendidikan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Menurut Mulyasa (2011: 22) manajemen sekolah secara langsung mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kurikulum, berbagai peralatan belajar, waktu mengajar dan proses pembelajaran. Manajemen sekolah itu ada yang telah digali dan belum digali. Dengan demikian, upaya

peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dengan pembenahan manajemen sekolah, di samping peningkatan kualitas guru dan sumber belajar.

Manajemen sekolah berarti penataan dengan mendayagunakan sumber-sumber potensial baik yang bersifat manusia maupun yang bersifat non-manusia guna mencapai tujuan sekolah (Imron, 1994: 55). Ada dua aspek manajemen sekolah, ialah manajemen proses dan manajemen substantif (Sahertian, 1994: 24). Manajemen proses lazim juga dikenal dengan manajemen fungsional; manajemen substantif lazim juga dikenal dengan manajemen sasaran atau operasional. Manajemen fungsional meliputi perencanaan sekolah, pengorganisasian sekolah, penggerakan sekolah dan pengawasan sekolah. Manajemen substantif meliputi manajemen kurikulum dan pengajaran, manajemen peserta didik, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen partisipasi masyarakat, manajemen layanan khusus dan manajemen ketatausahaan sekolah.

Dengan demikian manajemen partisipasi masyarakat merupakan bagian dari manajemen substantif sekolah secara keseluruhan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilakukan secara individu maupun secara kelompok sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 54 dinyatakan bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional meliputi peran serta perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian

mutu layanan pendidikan. Partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan (Moeliono, 1990: 43). Dengan demikian yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam membantu dan bekerja sama dengan sekolah agar program sekolah berjalan lancar dan lulus yang dihasilkan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Konsepsi peran serta masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa kewenangan yang menurut Heller (dalam Muzakir, 1999: 53) di gambarkan dua bentuk peran serta, yaitu: (1) peran serta *Grass Root* menunjuk pada pergerakan organisasi dan sosial diajukan oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan adalah mereka, (2) peran serta *Government Mandated* (resmi), dimana peran serta masyarakat meliputi keperluan yang sah yang telah ada memberikan kesepakatan bagi masukan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan oleh agen pemerintah. Upaya menggerakkan peran serta masyarakat, menurut Passaribu dan Simanjuntak (1986: 32) sangat diperlukan adanya: pertama, pengklasifikasian jenis peran serta, kedua, peran serta ini perlu diwadahi. Agar kegairahan berperan serta tidak semakin menipis bahkan hilang. Wadah peran serta merupakan semacam lembaga yang berbentuk : (a) wadah peran serta buah pikiran, (b) wadah peran serta tenaga, (c) wadah peran serta harta benda, (d) wadah peran serta keterampilan

Berdasarkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu warga sekolah memiliki otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan

sumber daya sekolah guna memecahkan masalah dan menyelenggarakan aktifitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah.

Model MBS yang diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Menurut Ahmad (1994: 51) konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif, artinya MPMBS memberikan otonomi yang luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan, hendaknya melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat.

Indrafachrudi (1994: 37) menjelaskan bahwa agar partisipasi dapat dilaksanakan dengan baik, maka persiapkan anggota staf dengan pengetahuan tentang masyarakat, sejarahnya, tradisinya, kepercayaannya, kehidupan sosial ekonominya, bentuk pemerintahan, satuan-satuan komunikasi dalam masyarakat, kepemimpinan dan kesadaran berorganisasi masyarakat tersebut. Jenis partisipasi yang disumbangkan masyarakat sangat beragam, seperti: (a) partisipasi material bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi; (b) partisipasi pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan; (c) partisipasi tenaga/fisikal bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan pemikiran tetapi memiliki kepedulian dalam membantu sekolah; dan (d) partisipasi moral dalam bentuk dukungan penuh oleh berbagai lapisan masyarakat (Talizuduhu, 1990: 100).

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa SDN Jeruk III telah mengembangkan MBS sebagai salah satu alternatif sekolah dalam merespon otonomi di bidang pendidikan. Namun demikian dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Dari delapan SNP tersebut masih ada yang belum terpenuhi sehingga diperlukan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah guna bersama-sama melengkapi delapan standar nasional pendidikan.

Bukti implementasi MBS ditandai oleh partisipasi masyarakat yang tinggi serta keleluasan sekolah mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat, dan masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Berdasarkan refleksi di atas, maka ada alasan yang sangat mendasar untuk membahas masalah penelitian tersebut dalam tesis yang berjudul **“Manajemen Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Dasar Negeri Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan masalah umum penelitian adalah bagaimana manajemen partisipasi masyarakat (studi kasus Sekolah Dasar Negeri Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan)?

Masalah penelitian ini dijabarkan menjadi tiga sub masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana ciri-ciri partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana upaya sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen partisipasi masyarakat (studi kasus Sekolah Dasar Negeri Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan).

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirinci menjadi tiga sub tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengkaji dan mendeskripsikan ciri-ciri partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Mengkaji dan mendeskripsikan upaya sekolah dalam peningkatan partisipasi masyarakat pada SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
3. Mengkaji dan mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan tentang.

- a. Ciri-ciri partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu sekolah pada SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
- c. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah pada SDN Jeruk III Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan berharga bagi pemerintah, para praktisi pendidikan, kepala sekolah, para pendidik, dan para pemerhati pendidikan terutama sekolah untuk melakukan penelitian lebih mendalam, guna memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan sekolah dasar dan lembaga pendidikan pada umumnya.